

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama : Putri Retno Aryani
Nim : 222013179**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Nama : Putri Retno Aryani
Nim : 222013179**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUTRI RETNO ARYANI

NIM : 22 2013 179

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2017

Penulis



PUTRI RETNO ARYANI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah
dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Putri Retno Aryani
NIM : 222013179
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Maret 2017
Pembimbing,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM:0206046303/784021

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., AK., M.Si., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.*
- *Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu tetapi dibalas dengan buah.*
- *Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas kelengahan kita tak akan bisa dikembalikan seperti semula.*

(Putri Retno Aryani)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ *Ibunda dan Ayah tercinta*
- ❖ *Kakakku Tersayang*
- ❖ *Teman-teman dan Sahabatku*
- ❖ *Almamaterku*



PRAKATA

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, karunia dan ridho kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah pada uswah tercinta Rosulullah Muhammad SAW, sahabat dan keluarga serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberi dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E.,M.Si sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan , memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis ingin menyampaikan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak DR.Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,AK., M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, S.E.,AK., M.si, selaku Sekretaris Program Studi Akunatansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Seluruh pimpinan, dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada Saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput ari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, yang dapat mendorong penulis untuk lebih menyempurnakan skripsi ini ataupun karya-karya selanjutnya.

Akhir kata penulis ucapkan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Februari 2017

Putri Retno Aryani
222013179

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Depan/Cover	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiat	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Halaman Prakata	vi
Halaman Daftar Isi.....	viii
Halaman Daftar Tabel.....	x
Halaman Daftar Lampiran	xi
Abstrak.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	11
B. Landasan Teori	14
1. Teori Umum (<i>Grand Theory</i>)	14
2. Pertumbuhan Ekonomi	17
3. Pendapatan Asli Daerah.....	19
4. Dana Alokasi Umum	22
5. Belanja Modal	23
C. Kerangka Berfikir	28
D. Hipotesis	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34

	B. Lokasi Penelitian	35
	C. Operasionalisasi Variabel	36
	D. Populasi dan Sampel.....	37
	E. Data yang diperlukan.....	38
	F. Metode Pengumpulan Data	39
	G. Analisis Data dan Teknik Analisis	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	48
	1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan	48
	2. Hasil Pengelolaan Data	57
	1) Statistik Deskriptif	60
	2) Uji Normalitas	60
	3) Uji Asumsi Klasik	62
	4) Analisis Regresi Linier Berganda	65
	a) Uji Korelasi dan Determinasi (R^2)	68
	b) Uji Simultan (Uji F)	69
	c) Uji Parsial (Uji t)	71
	B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	74
BAB V	SIMPILAN DAN SARAN	
	A. Simpulan.....	82
	B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Pertumbuhan Ekonomi	5
Tabel I.2 Data PAD dan DAU	6
Tabel I.3 Data Belanja Modal	8
Tabel II.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya.....	13
Tabel III.1 Operasonalisasi Variabel.....	36
Tabel III.2 Daftar Nama Kabupaten/Kota Prov. Sumsel	37
Tabel III.3 Daftar Nama Kabupaten/Kota Prov. Sumsel	38
Tabel III.4 Kriteria Koefisien Korelasi	45
Tabel IV.1 Daftar Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan.....	48
Tabel IV.2 Data Pertumbuhan Ekonomi	58
Tabel IV.3 Data Pendapatan Asli Daerah	58
Tabel IV.4 Data Dana Alokasi Umum	59
Tabel IV.5 Data Belanja Modal	59
Tabel IV.6 Statisti Deskriptif	60
Tabel IV.7 Hasil pengujian Normalitas Data	61
Tabel IV.8 Hasil Pengujian Autokorelasi	62
Tabel IV.9 Hasil Uji Multikolinearitas	63
Tabel IV.10 Hasil Uji Heterokedasitas	64
Tabel IV.11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
Tabel IV.12 Hasil Uji Korelasi dan Determinasi (R^2)	68
Tabel IV.13 Hasil Uji F	70
Tabel IV.14 Hasil Uji t.....	72

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
dan Belanja Modal serta PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2012-2014
- Lampiran 2 : Hasil Perhitungan menggunakan SPSS 20
- Lampiran 3 : Biodata Penulis
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Selesai Melakukan Riset
- Lampiran 5 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Quran
- Lampiran 6 : Sertifikat Toefl
- Lampiran 7 : Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 8 : Berita Acara
- Lampiran 9 : Lembar Perbaikan Skripsi

ABSTRAK

Putri Retno Aryani / 222013179/2017 / Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2012 – 2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2012-2014 yang diperoleh melalui website www.djpk.depkeu.go.id dan Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda. Hasil penelitian ini secara Simultan menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

ABSTRACT

Putri Retno Aryani / 222013179/2017 / The Influence of Economic Growth, Local Revenue and General Fund Allocation toward Appropriation of Capital Budget In Districts/City in South-Sumatera Province

This research is aimed at determining the influence of economic growth, local revenue and general fund allocation toward appropriation of capital budget In Districts/City in South-Sumatera Province 2012-2014, the samples used in this study were 11 districts/cities in South Sumatera Province in line with the source of Realization Report Budget (APBD) 2012-2014 which was accessed from www.djpk.depkeu.go.id and Economic Growth which was obtained from the Central Statistics Agency of South-Sumatera Province. The data used in this research was secondary data. The technique of analyzing the data was using multiple regression test. Simultaneously, the results showed that Economic Growth, Local Revenue and General Fund Allocation had positive significant influence toward capital expenditures. While, partially, the results showed that Economic Growth had no positive significant influence toward Capital Expenditure, regional revenue had no positive significant influence toward Capital Expenditure, General Fund Allocation had positive significant toward Capital Expenditure.

Keywords: Economic Growth, PAD, DAU and Capital Expenditure

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, meningkatkan kuantitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing serta mengurangi ketidak merataannya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antar pemerintah pusat dan daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, dapat diperoleh gambaran apakah kebijakan pembangunan disuatu daerah telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk menetapkan perekonomian daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam era Desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Menurut Halim (2014: 107) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan

ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Pertumbuhan ekonomi di daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto. Menurut Arsyad (2015: 12) Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatkan alokasi belanja modal daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD. Menurut Halim (2014 : 102-104) Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, lain-lain PAD yang sah. Tujuan PAD sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong meningkatkan investasi belanja

modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.

Kemampuan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai kegiatan, hal ini menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Amandemen Undang-Undang Pemda (UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dana Alokasi Umum merupakan penyangga utama pembiayaan APBD yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan sangat berkurang.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan keuangan antar Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat,

diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat untuk membiayai belanja modal.

Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota dalam beberapa tahun berjalan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap daerah masih sangat tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pasokan dari Pemerintah Pusat sehingga menyebabkan tidak stabilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran.

Berikut ini adalah Tabel Pertumbuhan Ekonomi, Realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Realisasi Dana Alokasi Umum serta Realisasi Belanja Modal Tahun 2012-2014 :

Tabel I.1
Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan
2012-2014

No	Kabupaten/Kota	PDRB (%)		
		2012	2013	2014
1	Kabupaten Lahat	5.28	4.83	3.83
2	Kabupaten Musi Rawas	0.85	5.88	7.37
3	Kabupaten Muara Enim	8.27	6.76	3.13
4	Kabupaten Ogan Komering Ilir	6.56	6.36	5.07
5	Kabupaten Ogan Komering Ulu	5.26	4.46	3.67
6	Kabupaten Empat Lawang	6.11	5.39	4.23
7	Kabupaten Banyuasin	6.15	6.18	5.14
8	Kabupaten OKU Timur	7.20	6.96	5.19
9	Kabupaten Ogan Ilir	8.03	7.26	6.55
10	Kota Lubuk Linggau	6.35	3.37	6.33
11	Kota Palembang	7.75	5.85	5.24

Sumber : Data yang diolah, 2017

Dilihat dari tabel I.1 bahwa Pertumbuhan Ekonomi pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan hampir di setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada kabupaten Musi Rawas dalam tiga tahun mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi terutama dari tahun 2012 ke 2013 sebesar 5.03% sedangkan dari tahun 2013 ke 2014 naik sebesar 1.49%, ini bisa disebabkan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Namun pada kabupaten Muara Enim Pertumbuhan Ekonomi justru mengalami penurunan, dari tahun 2012 ke 2014 terjadi penurunan sebesar 1.51% sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 3.63%, ini bisa disebabkan karena berkurangnya kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat berkurang.

Tabel I.2
PAD dan DAU pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan
2012-2014

No	Kabupaten	PAD (Rp)			DAU (Rp)		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	Kab. Lahat	70938	78313	125319	516937	566788	615240
2	Kab. Musi Rawas	73018	75367	120153	537624	635201	420562
3	Kab. Muara Enim	119456	125111	138706	580314	678488	593564
4	Kab.Ogan Komering Ilir	54618	68701	145591	743453	844191	931159
5	Kab.Ogan Komering Ulu	41429	44680	79344	456823	517310	568771
6	Kab. Empat Lawang	21467	24230	32656	274671	308418	360872
7	Kab. Banyuasin	67767	81364	106918	651358	772464	824219
8	Kab. Oku Timur	34834	36918	62418	541449	680714	680714
9	Kab. Ogan Ilir	31742	22080	49061	446519	520288	334233
10	Kota Lubuk Linggau	38256	41693	50181	328282	377967	414758
11	Kota Palembang	518859	558705	734219	934084	1125008	1203662

Sumber : Data yang diolah, 2017

Dilihat dari tabel I.2 bahwa Pendapatan Asli Daerah dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tiga tahun dari 2012-2013 mengalami peningkatan, namun pada kecamatan Ogan Ilir Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 ke 2013 Pendapatan Asli Daerah kabupaten Ogan Ilir mengalami penurunan sebesar Rp 9.666,- namun pada tahun 2013 ke 2014 terjadi peningkatan sebesar Rp 26.981,-. Turunnya Pendapatan Asli Daerah bisa disebabkan dari penerimaan pendapatan yang rendah, misalnya penerimaan dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Selain Pendapatan Asli Daerah, dari tabel I.2 juga kita bisa lihat bahwa Dana Alokasi Umum dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa Kabupaten/Kota yang Dana Alokasi Umumnya mengalami fluktuasi. Pada Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2012 ke 2013 Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan sebesar Rp 97.577,- namun pada tahun 2013 ke 2014 Dana Alokasi Kabupaten Musi Rawas terjadi penurunan sebesar Rp 214.639,-. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN.

Tabel I.3
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan
2012-2014

NO	Kabupaten/Kota	Belanja Modal (Rp)		
		2012	2013	2014
1	Kab. Lahat	240108	409290	369550
2	Kab. Musi Rawas	447716	564542	413464
3	Kab. Muara Enim	555453	819081	624279
4	Kab. Ogan Komering Ilir	381294	481992	444998
5	Kab. Ogan Komering Ulu	221203	341065	290864
6	Kab. Empat Lawang	177210	245491	365015
7	Kab. Banyuasin	337733	561773	653603
8	Kab. Oku Timur	165289	252320	238864
9	Kab. Ogan Ilir	320696	463615	334233
10	Kota Lubuk Linggau	162347	282058	295111
11	Kota Palembang	397764	678418	618887

Sumber : Data yang diolah, 2017

Dilihat dari tabel I.3 Belanja Modal di pada 11 kabupaten/kotadi Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami fluktuasi, akan tetapi pada kabupaten Muara Enim Belanja Modal mengalami penurunan cukup banyak pada tahun 2013 ke 2014 sebesar Rp 184.802,-. Penurunan angka Belanja Modal bisa disebabkan karena sedikitnya pendapatan daerah yang diterima sehingga membuat angka belanja modal turun.

Menurut penelitian yang dilakukan Mayasari, dkk (2014) yang mengatakan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maslikah (2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal dan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto (2013) menunjukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap

belanja modal serta penelitian yang dilakukan Sumarmi (2008) hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal APBD.

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disajikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti

Bagi peneliti yang tertarik pada bidang kajian ini dapat menjadi refrensi dan data tambahan serta mendapatkan pengalaman secara empiris tentang kegiatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam mengalokasikan PAD, Dana Alokasi Umum.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini akan membuka wawasan baru berkenaan dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, sehingga dapat menjadi masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan.

3) Bagi Almamater

Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Wertianti dan Dwirandra (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal dengan menggunakan PAD dan DAU sebagai variabel moderasi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini mencakup 9 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang mana data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui observasi non perilaku berupa studi dokumentasi. Data penelitian ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik dan uji kesesuaian model dengan *Adjusted R²* sebesar 54,5% yang diolah dengan menggunakan teknik regresi linier berganda dengan variabel interaksi (*Moderated Regression Analysis*). Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa PAD mampu meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal, sedangkan DAU tidak mampu meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Maslikah (2014) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2009-2011 yang diperoleh melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Furqani dan Titimmah (2015) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemkab Sumenep (Periode 2009-2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemkab Sumenep. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kuantitatif deskriptif dan model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pada analisa secara simultan hasilnya variabel independen (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah) berpengaruh signifikan terhadap variabel independen (belanja modal). (2) analisa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Tabel II.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi. I G A Gede Wertianti, A.A.N.B Dwirandra (2013)	Persamaan penelitian ini terletak pada tujuannya. Yaitu sama-sama ingin mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap pengalokasian anggaran modal	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Bali sedangkan penelitian yang akan dilakukan sekarang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Siti Haniatun Maslikah (2014)	Persamaan penelitian ini terletak pada tujuannya. Yaitu sama-sama ingin mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah sedangkan penelitian yang akan dilakukan sekarang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemkab Sumenep (periode 2009-2013). Astri Furqon, Tittimah (2015)	Persamaan pada penelitian ini terletak pada analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti sekarang, penelitian sebelumnya hanya menggunakan dua variabel X sedangkan yang akan diteliti sekarang menggunakan tiga variabel X

Sumber : Penulis, 2017

B. Landasan Teori

1. Teori Umum (*Grand Theory*)

a) Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Menurut Mathius (2016: 2-4) pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata *Stakeholder* dapat diartikan sebagai segenap pihak yang berkaitan dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruh *Stakeholder* terhadap suatu isu *Stakeholder* dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu :

- 1) *Stakeholder* utama
- 2) *Stakeholder* pendukung
- 3) *Stakeholder* kunci

Teori kepentingan (*Expectancy- Value Theory*) adalah salah satu teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh pemirsanya dilihat dari kepentingan penggunaannya. Teori ini mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka tentang media tersebut.

Menurut Paton dalam Mathius (2016: 4) Teori pemangku kepentingan (*Stakeholder theory*), mengemukakan bahwa perusahaan dipandang merupakan suatu unit ekonomi terpisah yang beroperasi terutama untuk kepentingan pemegang

saham. Teori entitas selalu dikaitkan dengan partisipan dalam kegiatan ekonomi. Partisipan tersebut merupakan pihak yang akhirnya menerima manfaat dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat kegiatan ekonomi. Teori kesatuan juga mempunyai implikasi tentang tujuan pelaporan keuangan dan bentuk atau susunan *statement* laba-rugi.

b) Teori Entitas (*Entity Theory*)

Menurut Paton dalam Mathius (2016: 4) teori entitas menekankan pada konsep pengelola *“stewardship”* dan penanggungjawaban *“accountability”* dimana tingkat keberlangsungan usaha dan informasi keuangan usaha bagi pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga suatu hubungan baik dengan pemegang ekuitas tersebut dengan memperoleh dana dimasa depan.

Menurut Khan dalam Mathius (2016: 4-5) teori entitas dapat juga dijelaskan pengungkapan informasi yang ada di internet sehubungan dengan tanggungjawab dan akuntabilitas perusahaanke pemegang saham, dan dalam rangka upaya untuk mencapai kebutuhan informasi pengguna, dimana kerangka peraturan yang ada telah mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna secara simultan, dan internet

menawarkan diri sebagai alat menyajikan informasi kepada pengguna dalam areal yang lebih luas dalam waktu yang sama.

Menurut Lawrence dan Fogarty dalam Mathius (2016: 5) teori entitas (*Entity Theory*), menyatakan bahwa setiap entitas bisnis dalam kantor Akuntan Publik menjalankan aktivitas usahanya untuk memenuhi berbagai pihak yang berkepentingan.

c) Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Mathius (2016: 5) *agency theory* yang membuat teori keagenan sebagai suatu versi dari *game theory* yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal itu dapat juga dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Kaitan *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat melakukan pelimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur

secara mandiri segala aktivitas pemerintahan di daerahnya. Oleh karena itu sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, teori keagenan tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Siregar (2015: 36) pemerintah daerah menggunakan data dan kondisi daerah untuk membentuk asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD. Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam penyusunan APBD salah satunya adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu ekonomi. Menurut Sukirno (2015: 423)

dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (Badan Pusat Statistik, 2015).

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun-n (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan

100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2015).

Berikut ini adalah rumus menghitung tingkat Pertumbuhan Ekonomi :

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Keterangan :

G = Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB₁ = PDRB ADHK pada satu tahun

PDRB₀ = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Siregar (2015: 31) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Menurut Halim (2014: 101-103) kelompok pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatn, yaitu :

a) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan c.
- 7) Pajak lingkungan
- 8) Pajak mineral bukan logam batuan
- 9) Pajak parkir
- 10) Pajak sarang burung walet
- 11) Pajak bumi dan banguna perdesaan dan perkotaan
- 12) BPHTB

b) Retribusi Daerah

Menurut Halim (2014: 102-104) Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

3) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d) Lain –lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas.

4. Dana Alokasi Umum

Menurut Amandemen UU Pemda (UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah secara horizontal. Di dalam Amandemen UU Pemda (UU RI No. 23 Tahun 2015) pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dengan perimbangan tersebut, khususnya DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Siregar (2015: 144) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah secara horizontal. Di dalam UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-

kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN.

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah secara horizontal. Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan berdasarkan kebutuhan daerah yang menjadi target pemberian. Kebutuhan daerah diukur melalui luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan geografis dan tingkat pendapatan masyarakat. Kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan dengan menggunakan proporsi terbaik, dimana daerah miskin akan menerima Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar daripada daerah yang kaya. Semakin kaya suatu daerah maka Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan semakin kecil.

5. Belanja Modal

Menurut Siregar (2015: 29), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo

anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Halim (2014:107) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2014:107). Menurut Siregar (2015: 167) belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah “beban modal” sebagai padanan dari belanja modal. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal.

Belanja modal dapat diklasifikasikan sesuai dengan kategori aset tetap adalah sebagai berikut :

a) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah terdiri atas belanja modal pengadaan tanah perkampungan, tanah perkebunan, tanah kebun campuran,

tanah hutan, tanah kolam ikan, tanah danau, tanah rawa, tanah tandus, tanah padang rumput, tanah untuk bangunan gedung, tanah pertambangan, dan tanah untuk bangunan bukan gedung.

Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung meliputi pengeluaran untuk pengadaan tanah untuk bangunan perumahan, bangunan perdagangan/perusahaan, bangunan industri, bangunan tempat kerja, tanah kosong, bangunan perternakan, bangunan pengairan, serta bangunan jalan dan jembatan. Sedangkan belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung merupakan pengeluaran untuk pengadaan tanah untuk lapangan olahraga, parkir, penimbungan barang, pemancar, pengujian/pengolahan, lapangan terbang, bangunan jalan, bangunan air, bangunan instalasi, bangunan jaringan, bangunan olahraga, dan bangunan tempat ibadah.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal pengadaan alat-alat besar darat merupakan pengeluaran untuk pengadaan *trakttor, grader, excavator, pile driver, hauler, asphal equipment, compacting equipment, concrete equipment, loader*, alat pengangkut, dan mesin proses. Belanja modal pengadaan alat-alat besar apung merupakan pengeluaran untuk pengadaan *dredger, floating excavator, amphibi dredger*, kapal tarik, dan mesin proses apung.

Belanja modal pengadaan alat-alat bantu merupakan pengeluaran untuk pengadaan alat penarik, *feeder*, *compressor*, *electronic generating set*, pompa mesin bor, unit pemeliharaan lapangan, alat pengolahan air kotor, dan pembangkit uap air panas.

c) Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk pengadaan gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan, candi, monumen, rambu-rambu.

d) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Belanja modal pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran untuk pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan meliputi jalan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus, tol, kereta, dan landasan pacu. Jembatan meliputi jembatan negara, provinsi, kabupaten/kota, desa, khusus, tol, kereta api, landasan pacu, dan penyebrangan.

Bangunan irigasi meliputi bangunan air irigasi, air pasang surut, dan air rawa. Jaringan meliputi pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, pengembangan sumber air dan air tanah, air bersih, air kotor, bangunan air, instalasi air minum bersih, instalasi air kotor, pengolahan sampah non organik, pengolahan bahan bangunan, instalasi listrik, gardu listrik, instalasi

pertahanan, instalasi gas, instalasi pengaman, instalasi air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas.

e) Belanja aset tetap lainnya

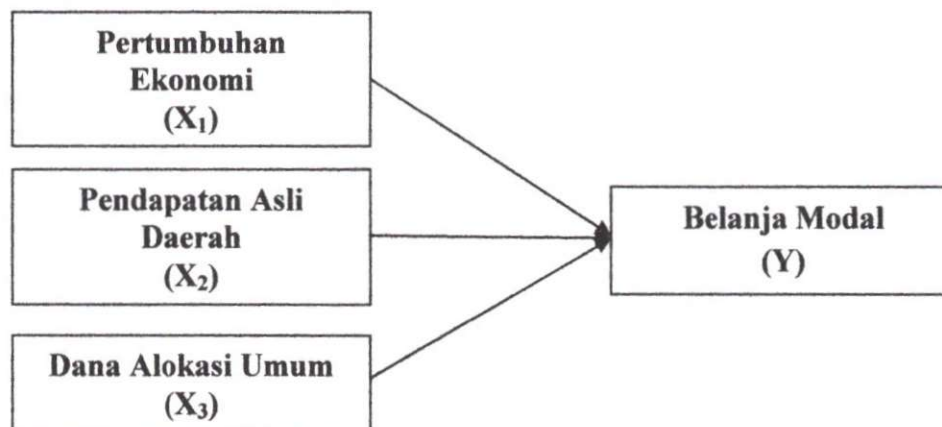
Belanja modal aset tetap lainnya merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya meliputi buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya, hewan, dan tanaman.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dengan demikian berarti, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pembiayaan pemerintah daerah di dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain penerimaan yang sah.

C. Kerangka Berpikir

Gambar II.1 Kerangka Berpikir



D. Hipotesis

Menurut Nuryaman dan veronica, (2015: 69) Hipo artinya belum, tesis artinya dalil. Hipotesis artinya belum menjadi dalil atau calon dalil. Untuk menjadi dalil hipotesis harus diuji secara empiris melalui penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Simultan

Kebijakan ekonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah dan merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu daerah tentu akan mengakibatkan bertumbuhnya ekonomi investasi modal swasta maupun pemerintah. Hal ini mengakibatkan pemerintah lebih leluasa dalam menyusun anggaran belanja modal.

Pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya menggunakan sumber dananya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah. Untuk di Pemerintah daerah di Indonesia, Pendapatan cenderung mempengaruhi Belanja. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan di daerah dimana menunggu kepastian DAU dulu baru menentukan alokasi belanja dalam APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Mayasari, dkk (2014) menyatakan bahwa yang mengatakan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H_1 = Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Parsial.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan kebijakan yang berupa pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah lain bisajadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula.

Pertumbuhan ekonomi ialah proses output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan

demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk (2014) terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. Dari landasan teori dan temuan empiris-empiris diatas menghasilkan hipotesis berikut :

H_2 = Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Parsial

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

Wertianti dan Dwirandra (2013) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. hal ini sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 yang mengatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H_3 = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

4. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Parsial.

Pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah pusat dan pemerintah daerah anatar pemerintah

daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisas. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Maslikah (2014) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal. Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris diatas menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

H_4 = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 54) ditinjau dari tingkat eksplanasi jenis penelitian dibagi menjadi tiga macam :

1) Penelitian Deskriptif

Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel atau lebih tanpa melihat perbandingan atau hubungannya dengan variabel.

2) Penelitian Komparatif

Adalah penelitian yang bersifat membandingkan variabel satu dengan variabel lain yang sejenis.

3) Penelitian Asosiatif

Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Asosiatif yang dimana untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Karena untuk mengetahui hubungan variabel terikat yaitu pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Alokasi Umum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Sastro No.1694/1131, Sungai Pangeran, Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114, telp (0711 3551665) dan Laporan Realisasi APBD Sumatera Selatan yang dapat diakses melalui situs resmi pemerintah www.djpk.depkeu.go.id

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasionalisasi variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah.	PDRB harga Konstan
Pendapatan Asli Daerah (X_2)	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah
Dana Alokasi Umum (X_3)	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Dana Transfer Umum
Alokasi Belanja Modal (Y)	Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi	1. Belanja tanah 2. Belanja peralatan dan mesin 3. Belanja modal gedung dan bangunan 4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan 5. Belanja aset tetap lainnya

Sumber : Penulis, 2017

D. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan adalah 17 Kabupaten/Kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purpose sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan dan menggunakan *time series* sebanyak 3 tahun dari 2012-2014. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD di dalam situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Tabel III.2
Daftar Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2012-2014

No.	Kabupaten/kota
1	Kabupaten Lahat
2	Kabupaten Musi Rawas
3	Kabupaten Muara Enim
4	Kabupaten Ogan Komering Ilir
5	Kabupaten Ogan Komering Ulu
6	Kabupaten Empat Lawang
7	Kabupaten Banyuasin
8	Kabupaten OKU Timur
9	Kabupaten Ogan Ilir
10	Kota Lubuk Linggau
11	Kota Palembang
12	Kota Prabumulih
13	Kota Pagar Alam
14	Kabupaten OKU Selatan
15	Kabupaten PALI
16	Kabupaten Musi Rawas Utara
17	Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber: Penulis, 2017

2. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD dan yang melaporkan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal yang digunakan sebagai data penelitian ini secara berturut-turut dari tahun 2012 sampai dengan 2014

Tabel III.3
Daftar Nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2012-2014

No.	Kabupaten/kota
1	Kabupaten Lahat
2	Kabupaten Musi Rawas
3	Kabupaten Muara Enim
4	Kabupaten Ogan Komering Ilir
5	Kabupaten Ogan Komering Ulu
6	Kabupaten Empat Lawang
7	Kabupaten Banyuasin
8	Kabupaten OKU Timur
9	Kabupaten Ogan Ilir
10	Kota Lubuk Linggau
11	Kota Palembang

Sumber: *Penulis, 2017*

Berdasarkan kriteria diatas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 11 Kabupaten/Kota selama 3 tahun berturut-turut dari Tahun 2012-2014 sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 33 data sampel Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

E. Data yang diperlukan

Menurut Indrianto & Bambang (2009: 145-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung sumbernya (tidak melalui perantara).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain)

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa Realisasi APBD yang didapat melalui situs resmi pemerintah yaitu www.djpk.depkeu.go.id dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) yang didapat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

F. Metode Pengumpulan Data

Data menurut Sugiyono (2014: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1) Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2) Kuisioner (angket)

Kuisioner (angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, berupa data Laporan Realisasi APBD dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif dan Kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan laporan realisasi APBD dan Pertumbuhan ekonomi, kemudian hasil data realisasi APBD dan Pertumbuhan ekonomi menggunakan kalimat-kalimat Kualitatif.

2. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini peneliti mengolah data dengan melakukan analisis regresi berganda yaitu Uji t dan Uji F. Metode analisis data dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik.

2) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabelbebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorow Smirnov* satu arah. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi

normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal Ghozali (2005).

3) Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik terdiri dari :

a) Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria jika Nachrowi dan Usman (2002) :

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

b) Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Apabila hasil uji di atas level signifikan ($r > 0,05$) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila level di bawah signifikan ($r < 0,05$) berarti terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2005).

c) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti ada hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang independen dari model yang ada. Akibat adanya multikolinearitas ini koefisien regresi tidak tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Batas dari *tolerance value* > 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

4) Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sujarweni (2015: 225) metode analisis regresi berganda ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel linier, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda yang diolah dengan perangkat lunak SPSS (*Statistical Program for Special Science*). Persamaan regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Belanja modal
- X₁ = Pertumbuhan Ekonomi
- X₂ = Pendapatan Asli Daerah
- X₃ = Dana Alokasi Umum

$\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi

e = Error

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2) dan Korelasi

Menurut Sujarweni (2015: 225), Koefisien determinasi (*Goodness of fit*) yang dinotasikan dengan R^2 merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi R^2 mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen Ghozali (2005).

Menurut Pardede dan Renhard (2014: 31-32) menyatakan bahwa analisis korelasi ini merupakan jenis analisis korelasi yang paling banyak digunakan. Dasar pemikiran analisis korelasi *product moment* adalah perubahan antar variabel. Artinya, jika perubahan suatu variabel diikuti perubahan variabel yang lain maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Jika persentase perubahan variabel diikuti dengan perubahan variabel lain dengan persentase yang sama persis berarti kedua variabel itu memiliki korelasi sempurna (atau memiliki korelasi 1) oleh karena itu, jika sebuah variabel dikorelasikan dengan variabel itu sendiri (X dengan X,

atau Y dengan Y) maka akan menghasilkan nilai korelasi sempurna atau 1. Untuk mencari koefisien korelasi *product moment* digunakan rumus sebagai berikut :

$$(1) r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

(2) Keterangan :

(3) r_{xy} = Koefisien korelasi *product moment*

(4) n = Jumlah pengamatan

(5) $\sum x$ = Jumlah Pengamatan dari nilai X

(6) $\sum y$ = Jumlah Pengamatan dari nilai Y

(7) r_{xy} merupakan koefisien korelasi nilainya akan senantiasa berkisar antara -1 sampai dengan 1. Bila koefisien korelasi semakin mendekati angka 1 berarti korelasi tersebut semakin kuat, tetapi jika koefisien korelasi tersebut mendekati angka 0 berarti korelasi tersebut semakin lemah. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemberian katagori koefisien korelasi maka dibuat kriteria pengukuran berikut :

Tabel III.4
Kriteria Koefisien Korelasi

Nilai r	Kriteria
0,00 s.d 0,29	Korelasi Sangat Lemah
0,30 s.d 0,49	Korelasi Lemah
0,50 s.d 0,69	Korelasi Cukup
0,70 s.d 0,79	Korelasi Kuat
0,80 s.d 1,00	Korelasi Sangat Kuat

b) Uji Simultan (Uji F)

Signifikan model regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikan (sig) dimana jika nilai sig di bawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F-statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Kriteria :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Atau

- a. Jika $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b. Jika $p > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

c) Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen Ghazali (2005). Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan (α) $< 0,05$ dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan (α) $> 0,05$.

Kriteria :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Atau

- a. Jika $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b. Jika $p > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diteruma.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan

a) Keadaan Geografi

Secara geografis, Provinsi Sumatera Selatan terletak diantara $1^0 - 4^0$ LS dan $102^0 - 106^0$ BT dengan luas daerah seluruhnya 8.702.741Ha. Letak provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah Utara, Provinsi Lampung di sebelah Selatan, Provinsi Bangka Belitung di sebelah Timur dan Provinsi Bengkulu di sebelah Barat.

b) Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Tabel IV.1
Daftar Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan

Kabupaten/kota	Luas Wilayah (ha)	Kecamatan (unit)	Desa (unit)	Kelurahan (unit)
1. Kabupaten Lahat	4.076,06	21	359	17
2. Kabupaten Musi Rawas	12.134,57	21	268	20
3. Kabupaten Muara Enim	8.587,94	22	310	16
4. Kabupaten Ogan Komering Ilir	17.058,32	18	297	13
5. Kabupaten Ogan Komering Ulu	2.772,56	12	140	14
6. Kabupaten Empat Lawang	2.556,44	10	147	8
7. Kabupaten Banyuasin	14.447,00	14	223	13
8. Kabupaten OKU Timur	3.410,15	20	289	7
9. Kabupaten Ogan Ilir	2.513,09	16	0	107
10. Kota Lubuk Linggau	419,80	8	0	72
11. Kota Palembang	374,03	16	0	107

Sumber : *Penulis, 2017*

c) Wilayah Administrasi

Seperti halnya provinsi-provinsi lain di Indonesia, Sumatera Selatan dibagi menjadi kabupaten dan kota. Kabupaten/Kota dibagi menjadi kecamatan-kecamatan, dan selanjutnya kecamatan dibagi-lagi menjadi desa-desa dan kelurahan-kelurahan. Jumlah kabupaten di Sumatera Selatan mencapai 13 Kabupaten dan 4 kota pada tahun 2014. Secara total, jumlah wilayah administrasi di Sumatera Selatan tahun 2014 mencapai 2.872 desa, 385 kelurahan dan 231 kecamatan.

d) Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk mengukur pertumbuhan perekonomian disuatu wilayah. Selama empat tahun terakhir, PDRB Sumsel dengan migs atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 nilai tambah yang terbentuk sebesar 226,67 triliyun rupiah. Pada tahun 2012 angka ini sebesar 253,26 triliyun rupiah dan tahun 2013 sebesar 281,99 triliyun rupiah. Pada tahun 2014, nilainya menjadi sebesar 308,41 triliyun rupiah.

Berdasarkan harga berlaku dengan migs, terdapat empat sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2014, empat sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor pertambangan, diikuti oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sektor industri pengolahan serta sektor konstruksi. Pada tahun 2014 kontribusi masing-masing sektor di atas secara berurutan adalah 23,97

persen, 17,81 persen, 17,47 persen dan 13,32 persen. Dibanding kondisi tahun sebelumnya, peran sektor konstruksi dan industri tanpa migas meningkat masing-masing sebesar 5,7 persen dan 4,43 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian menurun masing-masing sebesar 3,73 persen dan 5,52 persen.

e) Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumatera Selatan pada 2013 telah kembali pada tren jangka panjangnya, hal ini ditunjukkan dari angka pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dengan migas menurun dibanding tahun 2013 dari sebesar 5,98 persen menjadi 4,68 persendi tahun 2014. Begitu juga pertumbuhan ekonomi tanpa migas menurun dari sebesar 7,34 persen di tahun 2013 menjadi 5,35 persen di tahun 2014.

Tiga sektor besar yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pengilangan migas, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor pengilangan migas meningkat dari sebesar 0,10 persen tahun 2013 menjadi 1,48 persen tahun 2014, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial meningkat dari sebesar 0,74 persen tahun 2013 menjadi 6,20 persen tahun 2014, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat dari sebesar 3,00 persen tahun 2013 menjadi 5,63 persen tahun 2014. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar adalah jasa

keuangan dan asuransi dari sebesar 10,39 persen tahun 2013 menjadi 3,96 persen tahun 2014 atau menurun sebesar 61,89.

f) Kependudukan

Jumlah penduduk semakin bertambah dari tahun ke tahun. Untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada tahun 2014, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 8.03 juta jiwa atau naik sebesar 1,19 persen dibanding tahun 2013 yang sebesar 7,93 juta jiwa, diikuti provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk 7,94 juta jiwa atau naik 1,44 persen dibanding tahun 2013 yang sebesar 7,83 jta jiwa. Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terkecil, yaitu 1,34 juta jiwa pada tahun 2014 sedangkan pada tahun 2013 sebesar 1,31 juta jiwa. Jumlah penduduk provinsi Jambi pada tahun 2014 adalah 3,34 juta jiwa atau bertambah sebesar 1,52 persen dibanding tahun 2013, sedangkan jumlah penduduk provinsi Bengkulu tahun 2014 adalah 1,84 juta jiwa atau mengalami pertambahan penduduk 1,66 persen.

g) Perekonomian

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah laju pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita dan laju inflasi. PDRB sering dipakai sebagai indikator kemakmuran suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB atas dasar harga berlaku) provinsi-provinsi di wilayah Sumatera bagian Selatan

menunjukkan penurunan pada tahun 2014. Provinsi Lampung mencatat laju pertumbuhan ekonominya pada tahun 2014 sebesar 5,08 persen. Berdasarkan urutannya untuk wilayah Sumatera bagian Selatan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi berada pada urutan teratas dengan nilai 7,76 persen, diikuti provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan dengan laju pertumbuhan masing-masing 5,49 persen dan 4,68 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bangka Belitung sebesar 4,68 persen.

h) Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan

- **Visi**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan milineum, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah :

**“SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN
BERDAYA SAING INTERNASIONAL”**

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Sejahtera mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan keduniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan profesional.

lebih maju adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosia. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu.

Berdaya Saing Internasional menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperan serta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang, terkadang

didalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan daerah dan kemaslatan masyarakat.

Sumatera Selatan dalam lima tahun ke depan akan mencapai :

- 1) Kemakmuran Daerah
- 2) Kesejahteraan Rakyat
- 3) Eksistensi Sumatera Selatan di lingkup Nasional, regional dan Internasional

- **Misi**

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- 2) Menetapkan stabilitas daerah
- 3) Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan
- 4) Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana

Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Misi kesatu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan perlu ditopang oleh pertumbuhan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi yang seimbang agar peningkatan jumlah permintaan tidak diikuti oleh tekanan inflasi yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mendorong (1) peningkatan

daya beli masyarakat, (2) peningkatan iklim investasi, (3) peningkatan penyerapan anggaran dan perbaikan kualitas belanja, serta (4) peningkatan daya saing ekspor. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mendorong (1) peningkatan nilai tambah industri, (2) peningkatan perdagangan antarwilayah, dan (3) peningkatan infrastruktur.

Misi 2: Meningkatkan stabilitas daerah

Misi kedua menekankan peningkatan stabilitas daerah melalui 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) stabilitas ekonomi dengan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, (2) stabilitas sosial dengan mencegah konflik sosial, melalui (a) pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan keadilan; (b) pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif; dan (c) pelaksanaan program dan kegiatan yang bernuansa membangun harmoni sosial; serta (3) stabilitas politik melalui: (a) pemantapan pertahanan dan keamanan dengan membangun kerjasama keamanan dengan berbagai instansi maupun lembaga baik secara formal maupun informal untuk mempermudah penanganan berbagai permasalahan yang semakin kompleks; serta meningkatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam mengkritisi, menangani kamtibmas, meningkatkan kewaspadaan lingkungan atas berbagai kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, terutama kemungkinan terjadinya aksi terorisme; (b) pemantapan pelaksanaan Pemilu dan Pilukada dengan mendukung

penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilukada; memelihara kebebasan sipil dan hak-hak politik warga dengan memperhatikan dan menindaklanjuti secara seksama Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; serta memfasilitasi peningkatan peran dan kapasitas forumforum komunikasi seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kesatuan Umat Beragama (FKUB).

Misi 3: Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan

Misi ketiga mengutamakan pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Misi meningkatkan pemerataan yang berkeadilan diharapkan akan mendorong (1) pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan pemanfaat; (2) peningkatan SDM yang berkualitas berbasis kompetensi, dan (3) penanggulangan kemiskinan difokuskan kepada pengembangan penghidupan yang berkelanjutan dan melakukan sinergi dari seluruh pihak, termasuk kerjasama dan kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana

Misi keempat menegaskan pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan yang berkelanjutan yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Misi ini diharapkan akan (1) meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara lestari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan; (2) mengendalikan kerusakan lingkungan, dengan menurunkan pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian sumber-sumber pencemaran; (3) meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu; serta (4) meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah, menjamin berlangsungnya fungsi sistem peringatan dini dan menyediakan infrastruktur kesiapsiagaan.

2. Hasil Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dan diolah berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan situs resmi pemerintah www.djpk.depkeu.go.id yang menjadi sampel yang meliputi data :

- a. Pertumbuhan Ekonomi dari Badan Pusat Statistik per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2012-2014

Tabel IV.2
Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan
2012-2014

No	Kabupaten/Kota	PDRB (%)		
		2012	2013	2014
1	Kabupaten Lahat	5.28	4.83	3.83
2	Kabupaten Musi Rawas	0.85	5.88	7.37
3	Kabupaten Muara Enim	8.27	6.76	3.13
4	Kabupaten Ogan Komering Ilir	6.56	6.36	5.07
5	Kabupaten Ogan Komering Ulu	5.26	4.46	3.67
6	Kabupaten Empat Lawang	6.11	5.39	4.23
7	Kabupaten Banyuasin	6.15	6.18	5.14
8	Kabupaten OKU Timur	7.20	6.96	5.19
9	Kabupaten Ogan Ilir	8.03	7.26	6.55
10	Kota Lubuk Linggau	6.35	3.37	6.33
11	Kota Palembang	7.75	5.85	5.24

Sumber : Data yang diolah, 2017

b. Pendapatan Asli Daerah dari laporan Realisasi APBD Provinsi

Sumatera Selatan Kabupaten/Kota dari tahun 2012-2014

Tabel IV.3
PAD pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan
2012-2014

No	Kabupaten	PAD (Rp)		
		2012	2013	2014
1	Kab. Lahat	70938	78313	125319
2	Kab. Musi Rawas	73018	75367	120153
3	Kab. Muara Enim	119456	125111	138706
4	Kab. Ogan Komering Ilir	54618	68701	145591
5	Kab. Ogan Komering Ulu	41429	44680	79344
6	Kab. Empat Lawang	21467	24230	32656
7	Kab. Banyuasin	67767	81364	106918
8	Kab. Oku Timur	34834	36918	62418
9	Kab. Ogan Ilir	31742	22080	49061
10	Kota Lubuk Linggau	38256	41693	50181
11	Kota Palembang	518859	558705	734219

Sumber : Data yang diolah, 2017

c. Dana Alokasi Umum dari Laporan Realisasi APBD Provinsi

Sumatera Selatan Kabupaten/Kota dari tahun 2012-2014

Tabel IV.4
DAU pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan
2012-2014

No	Kabupaten	DAU (Rp)		
		2012	2013	2014
1	Kab. Lahat	516937	566788	615240
2	Kab. Musi Rawas	537624	635201	420562
3	Kab. Muara Enim	580314	678488	593564
4	Kab. Ogan Komering Ilir	743453	844191	931159
5	Kab. Ogan Komering Ulu	456823	517310	568771
6	Kab. Empat Lawang	274671	308418	360872
7	Kab. Banyuasin	651358	772464	824219
8	Kab. Oku Timur	541449	680714	680714
9	Kab. Ogan Ilir	446519	520288	334233
10	Kota Lubuk Linggau	328282	377967	414758
11	Kota Palembang	934084	1125008	1203662

Sumber : Data yang diolah, 2017

d. Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Sumatera

Selatan Kabupaten/Kota dari Tahun 2012-2014

Tabel IV.5
Belanja Modal pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan
2012-2014

NO	Kabupaten/Kota	Belanja Modal (Rp)		
		2012	2013	2014
1	Kab. Lahat	240108	409290	369550
2	Kab. Musi Rawas	447716	564542	413464
3	Kab. Muara Enim	555453	819081	634279
4	Kab. Ogan Komering Ilir	381294	481992	444998
5	Kab. Ogan Komering Ulu	221203	341065	290864
6	Kab. Empat Lawang	177210	245491	365015
7	Kab. Banyuasin	337733	561773	653603
8	Kab. Oku Timur	165289	252320	238864
9	Kab. Ogan Ilir	320696	463615	334233
10	Kota Lubuk Linggau	162347	282058	295111
11	Kota Palembang	397764	678418	618887

Sumber : Data yang diolah, 2017

1) Statistik Deskriptif

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah 33 dari 11 Kabupaten/Kota dalam waktu 3 tahun. Dari tabel IV.2 menunjukkan hasil statistik deskriptif yaitu nilai maksimum rata-rata, dan deviasi standar (standar deviasi) dari variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel tersebut meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Tabel IV.6
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	33	.85	8.27	5.6624	1.57147
PAD	33	21467	734219	117397.33	162680.084
DAU	33	274671	1203662	605639.55	225422.075
Belanja Modal	33	162347	819081	398949.27	163997.807
Valid N (listwise)	33				

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, 2017

Berdasarkan Tabel IV.6 dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 33, diperoleh gambaran nilai mean serta standar deviasi masing-masing variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

2) Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dapat

dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorow Smirnov* satu arah. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika signifikan $> 0,05$, maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas data untuk item-item variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3) dan Belanja Modal (Y) dapat dilihat dengan hasil pengelolaan data dengan menggunakan SPSS.

Berikut ini merupakan tabel hasil pengujian normalitas dengan menggunakan program SPSS Versi 20 dapat dilihat pada Tabel IV.3 :

Tabel IV.7
Hasil Pengujian Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	130256.5665
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.712
Asymp. Sig. (2-tailed)		.691

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, 2017

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai residual untuk data sebesar 0,691 yang berarti $> 0,05$ signifikansi residualnya berdistribusi normal.

3) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen titik berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin Watson dengan ketentuan jika Durbin Watson dengan ketentuan jika Durbin Watson :

- 1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- 2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

Uji Durbin Watson penelitian ini dibantu dengan SPSS Versi 20 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.8
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.608 ^a	.369	.304	136828.201	1.896

a. Predictors: (Constant), DAU, PDRB, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, 2017

Berdasarkan hasil pengujian diatas, nilai DW adalah 1.896 yang berarti nilai tersebut berada di antara -2sampai +2 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model dalam penelitian ini.

b) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*Independent Variabel*). Untuk mendeteksi apakah terjadi Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance Value* dan *variance inflation factor VIF*. Metode untuk menguji adanya Multikolinearitas ini dapat dilihat dari *tolerance Value* atau *variance inflation factor (VIF)*. Batas dari *tolerance value* $> 0,10$ atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas. Penelitian ini dibantu dengan SPSS 20 dengan hasil sebagai berikut

Tabel IV.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PDRB	.996	1.004
PAD	.409	2.447
DAU	.409	2.447

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, 2017

berdasarkan tabel IV.9 diatas, menunjukkan output coefficient nilai VIF masing-masing Variabel pada kolom output coffecients untuk variabel X_1 sebesar 1,004 dan untuk variabel X_2 sebesar 2,447 dan variabel X_3 sebesar 2,447, ketiga nilai variabel lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi persoalan multikolonieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

c) Uji heterokedasitas

Uji heterokedasitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Apabila hasil uji di atas level signifikan ($r > 0,05$) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila level dibawah signifikan ($r < 0,05$) berarti terjadi heteroskedastisitas Ghazali (2005).

Tabel VI.10
Hasil Uji heterokedasitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-7864.312	70213.085		.912
	PDRB	9849.932	8989.459	.195	.282
	PAD	-.140	.136	-.287	.310
	DAU	.116	.098	.329	.246

a. Dependent Variable: res2

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, 2017

Berdasarkan tabel IV.10 diatas, dari hasil Uji Glejser dilihat bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berada diatas 0,05 yang berarti model regresi tidak terdapat heterokedasitas.

4) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau berpengaruh antara variabel-variabel yang lebih dari satu dengan variabel-variabel terikat. Sebelum dilakukan uji hipotesis mengenai signifikan antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat maka terlebih dahulu harus diketahui apa sebuah model memiliki hubungan yang linier. Setelah melakukan regresi dengan SPSS Versi 20 maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabel VI.11
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	161779.475	120453.049		1.343	.190
PDRB	-5408.093	15421.742	-.052	-.351	.728
PAD	.001	.233	.001	.006	.995
DAU	.442	.168	.607	2.633	.013

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, 2017

Dari hasil perhitungan tabel diatas melalui program SPSS, diperoleh persamaan regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = 161779,475 - 5408,093X_1 + 0,001X_2 + 0,442X_3 + e$$

Dimana :

- 1) Konstanta sebesar 161779,475 menyatakan bahwa jika Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), PAD dan DAU bernilai nol maka skor belanja modal sebesar 161779,475.
- 2) Koefisien regresi X_1 sebesar -5408,093 bernilai negatif menyatakan bahwa setiap pengurangan satu satuan skor Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (X_1) akan mengurangi nilai belanja modal sebesar 5408,093 dengan menjaga variabel lain tetap/konstan.
- 3) Koefisien regresi X_2 sebesar 0,001 bernilai positif menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan skor PAD (X_2) akan meningkatkan skor belanja modal sebesar 0,001 dengan menjaga variabel lain tetap/konstan.
- 4) Koefisien regresi X_3 sebesar 0,442 bernilai positif menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan skor DAU (X_3) akan meningkatkan nilai belanja modal sebesar 0,442 dengan menjaga variabel lain tetap/konstan.

Artinya koefisien regresi b_1 memiliki arti bahwa jika Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1) menurun sebesar satu satuan, maka Belanja Modal (Y) akan menurun. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif, yang artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1) memberi pengaruh negatif terhadap Belanja Modal (Y), jadi semakin rendah variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1) maka semakin rendah pula Belanja Modal (Y), atau semakin tinggi variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1) maka semakin tinggi pula Belanja Modal (Y). Sedangkan koefisien b_2 Memiliki arti bahwa jika variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) meningkat sebesar satu satuan, maka Belanja Modal (Y) akan meningkat koefisien regresi tersebut bernilai positif yang artinya variabel Pendapatan asli Daerah (X_2) memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), jika semakin tinggi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) maka semakin tinggi pula Belanja Modal (Y), atau semakin rendah variabel Pendapatan Asli Daerah (X_2) maka semakin rendah pula Belanja Modal (Y). Dan koefisien b_3 Memiliki arti bahwa jika variabel Dana Alokasi Umum (X_3) meningkat sebesar satu satuan, maka Belanja Modal (Y) akan meningkat koefisien regresi tersebut bernilai positif yang artinya variabel Dana Alokasi Umum (X_3) memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), jika semakin tinggi variabel Dana Alokasi Umum (X_3) maka semakin tinggi pula Belanja Modal (Y), atau semakin rendah

variabel Dana Alokasi Umum (X_3) maka semakin rendah pula Belanja Modal (Y).

a) Uji Korelasi dan Determinasi (R^2)

Tabel IV.12
Hasil Uji Korelasi dan Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.608 ^a	.369	.304	136828.201

a. Predictors: (Constant), DAU, PDRB, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas dengan melalui program SPSS dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai korelasi (R) diperoleh sebesar = 0,608 yang berarti bahwa hubungan atau tingkat asosiasi variabel bebas yaitu PDRB, PAD dan DAU dengan variabel terikat yaitu belanja modal adalah cukup.
- Angka *Adjusted R Square* (nilai koefisien determinasi (R^2)) sebesar 0,369 memberikan makna bahwa variabel PDRB, PAD dan DAU mampu menjelaskan perubahan terhadap variabel belanja modal sebesar 36,9%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

b) Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Uji F ini menguji apakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, maka dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

H_0 : tidak adanya pengaruh yang signifikan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

H_a : adanya pengaruh yang signifikan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Hipotesis statistik diatas dapat diartikan bahwa H_0 menunjukkan variabel bebas, dan H_a menunjukkan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas. Menguji hipotesis tersebut menggunakan uji statistik F, yaitu dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada $\alpha=0,05$ dengan kriteria keputusan:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2) Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berikut ini adalah tabel hasil uji F (bersama-sama) yang diperoleh dengan menggunakan SPSS :

Tabel VI.13
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	317712245661.036	3	105904081887.01	5.657	.004 ^b
	Residual	542936739909.510	29	18721956548.604		
	Total	860648985570.545	32			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAU, PDRB, PAD

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 5,657 lebih besar dari F_{tabel} (2,934), hal ini juga diperkuat dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,004 atau signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, artinya H_0 ditolak, H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2) dan Dana Alokasi Umum (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y).

Dari hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) yang muncul adalah sebesar 0,004 yang berarti sig F ($0,004 \leq \alpha$ (0,05)), hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat sinifikasi yang kuat terjadi pada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka kesimpulannya Pertumbuhan

Ekonomi (PDRB) (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2) dan Dana alokasi Umum (X_3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal (Y).

c) Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Adapun hipotesis parsial yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_{01} = pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal

H_{a1} = pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal

H_{02} = Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal

H_{a2} = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal

H_{03} = Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal

H_{a3} = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap anggaran Belanja Modal

Kriteria pengambilan keputusan :

- Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Atau

- Jika $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- Jika $p > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diteruma

Hasil uji statistik-t merupakan suatu bentuk analisis parsial untuk masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Hasil uji t berguna untuk mengetahui apakah secara individual variabel (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi (Y) atau tidak. Besarnya koefisien parsial dan hasil uji statistik t dengan menggunakan SPSS disajikan dalam bentuk tabel ini.

Tabel IV.14
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1.343	.190
PDRB	-.351	.728
PAD	.006	.995
DAU	2.633	.013

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, 2017

Berdasarkan Tabel IV.14 dapat terlihat bahwa

output SPSS bahwa :

- 1) H_0 diterima dan H_a ditolak. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (X_1) mempunyai hubungan negatif, hal ini berarti bila PDRB diturunkan, maka belanja modal juga turun. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} untuk variabel X_1 sebesar $-0,351$, sedangkan t_{table} sebesar $2,045$, maka $t_{hitung} (-0,351) > t_{tabel} (-2,045)$. Hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikan $0,728$ ($0,728 > 0,05$), maka dapat disimpulkan PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima. PAD (X_2) mempunyai hubungan positif, hal ini berarti bila PAD ditingkatkan, maka belanja modal juga meningkat. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} untuk variabel X_2 sebesar $0,006$, sedangkan t_{table} sebesar $2,045$, maka $t_{hitung} (0,006) < t_{tabel} (2,045)$. Hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikan $0,995$ ($0,995 > 0,05$), maka dapat disimpulkan PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.
- 3) H_0 ditolak dan H_a diterima. DAU (X_3) mempunyai hubungan positif, hal ini berarti bila DAU ditingkatkan, maka belanja modal juga meningkat. Hal ini dibuktikan

dengan nilai t_{hitung} untuk variabel X_3 sebesar 2,633, sedangkan t_{tabel} sebesar 2,045, maka $t_{hitung} (2,633) > t_{tabel} (2,045)$. Hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikan 0,013 ($0,013 < 0,05$), maka dapat disimpulkan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2014 dilakukan pembahasan sebagai berikut :

1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal secara Simultan

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi

perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi saat ini pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya berfluktuatif pada setiap kabupaten/kota yang juga diikuti oleh belanja modal hal ini dapat dilihat pada data Pertumbuhan Ekonomi dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2012-2014. Hal ini dapat terjadi karena alokasi Belanja Modal suatu daerah didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik, sedangkan perubahan Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah disebabkan oleh perubahan PDRB melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa yang dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu daerah.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin

baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tersebut.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber APBN untuk mendanai desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatkan untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Berdasarkan hasil uji statistik-F variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah pada tingkat $\alpha = 0,05$ dengan nilai signifikan 0,004. Hal tersebut berarti bahwa secara bersama-sama Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Secara Parsial

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, atau pertumbuhan ekonomi juga dapat dirlkan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional yang akhirnya berpengaruh terhadap belanja modal. Tetapi dalam hal ini, faktanya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terlalu diperhitungkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Selain itu adanya faktor yang mempengaruhi misalnya proses penyusunan anggaran setiap kabupaten/kota yang juga mempertimbangkan kondisi sosial politik didaerahnya selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil uji statistik-t tabel IV.10 diatas mengenai pengujian parsial dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi secara statistik berpengaruh Negatif terhadap pengalokasian Anggaran belanja Modal dan terdapat pengaruh tidak signifikan secara parsial dari Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai signifikan 0,728 ($\alpha = 0,05$). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maslikah (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Secara Parsial

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2012-2014 ini didominasi dari sektor retribusi, kemudian disusul dari sektor pajak, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah kota Palembang selama tahun 2012-2014. Pendapatan Asli Daerah terutama berasal dari pendapatan pajak daerah, lalu retribusi, lain-lain PAD serta kekayaan daerah yang dipisahkan. Sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang sangat memungkinkan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah-nya dari sektor pendapatan pajak daerah sebab melihat kondisi Kota Palembang sebagai pusat berkumpulnya aktivitas perdagangan, industri, dan jasa bagi daerah-daerah sekitarnya, sehingga keadaan seperti ini menjadi peluang bagi Kota Palembang untuk menggali pajak daerahnya terutama dari pajak hotel dan restoran, hiburan, reklame, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak semua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan melakukan hal yang sama untuk menggali kemampuan Pendapatan Asli Daerah-nya. Hal tersebut dapat disebabkan karena kondisi geografis

yang berbeda, jumlah penduduk, keadaan demografi yang beragam dan lain sebagainya.

Dari hasil analisis statistik-t tabel VI.10 terlihat bahwa Pendapatan Asli daerah sangat berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan nilai signifikan 0,995 ($\alpha = 0,05$). Demikian H_a yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal dapat diterima. Hal tersebut tidak sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto (2013) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

Melihat hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal dapat memberi sedikit acuan bahwa Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah hendaknya lebih terpacu lagi untuk memanfaatkan sumber daya daerah untuk dapat digunakan dalam rangka kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Dearah dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama

pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi Belanja Modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Dari peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut.

4) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Secara Parsial

Pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan Dana Alokasi Umum tertinggi Tahun 2012-2014 adalah Kota Palembang. Tingginya Dana Alokasi Umum disebabkan oleh celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan fiskal daerah melebihi kemampuan fiskal sehingga Pemerintah Daerah membutuhkan bantuan lain berupa Dana Alokasi Umum yang diterima. Sebenarnya Pemerintah Daerah dapat meminimalisir celah tersebut apabila Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya yang salah satunya dapat dilakukan melalui Pendapatan Asli daerah yang lebih besar.

Dari hasil analisis statistik-t tabel VI.10 terlihat bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan nilai signifikan 0,013 ($\alpha = 0,05$). Demikian H_a yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh

positif terhadap Belanja Modal dapat diterima. Artinya, pada saat terjadi peningkatan jumlah Dana Alokasi Umum akan berpengaruh pada peningkatan jumlah Belanja Modal. Hal tersebut sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2008) dengan hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki persentase yang cukup besar dibandingkan penerimaan daerah lainnya. Jumlah ini mengindikasikan, bahwa Belanja Modal masih bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Transfer ini bermaksud untuk meng-optimalkan pelaksanaan otonomi daerah bilamana terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran suatu daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasi bahwa DAU diperuntukkan untuk digunakan belanja Modal dan hanya sedikit untuk membiayai pengeluaran rutin seperti untuk belanja pegawai.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil-hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Simultan.
- 2) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.
- 3) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.
- 4) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian ini menggunakan sampel Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan saja. Dengan begitu daya generalisasi penelitian ini masih rendah. Studi ini dapat diperluas dengan menggunakan sampel diluar Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Penelitian selanjutnya mungkin dapat menggunakan periode pengamatan lebih dari tiga tahun, data yang lebih lengkap, dengan data APBD dan PDRB terbaru.
- 3) Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makroekonomi.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. YKPN. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2010). *Produk Domestik Regional Bruto 2015*.
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi 1. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Maslikah, Siti Haniatun. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Jawa Tengah: Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
(http://eprints.dinus.ac.id/17136/1/jurnal_15504.pdf. diakses 27 November 2016)
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. Yogyakarta: ANDI.
- Mathius Tandiontong. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Mayasari, Luh Putu Rani, dkk. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol. 2, No.1 Tahun 2014.
([http://download.portalgaruda.org/article.php?article=303441&title=PE NGARUH%20PERTUMBUHAN%20EKONOMI,%20PENDAPATAN%20ASLI%20DAERAH%20DAN%20DANA%20ALOKASI%20UMUM%20TERHADAP%20ANGGARAN%20BELANJA%20MODAL%20PADA%20PEMERINTAH%20KABUPATEN%20BULELENG](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=303441&title=PE%20NGARUH%20PERTUMBUHAN%20EKONOMI,%20PENDAPATAN%20ASLI%20DAERAH%20DAN%20DANA%20ALOKASI%20UMUM%20TERHADAP%20ANGGARAN%20BELANJA%20MODAL%20PADA%20PEMERINTAH%20KABUPATEN%20BULELENG). diakses 28 November 2016)
- Nuryaman dan Veronica Christina. (2015). *Metode Penelitian Akuntansi dan Bsinis*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan Belas. Bandung: CV Alfabeta.

Sujarweni, V.Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sukirno, Sadono. (2015). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi 1. Cetakan 21. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumarmi, Saptaningsih. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta*. (http://upy.ac.id/ekonomi/files/PENGARUH%20PENDAPATAN%20ASLI%20DAERAH,%20DANA%20ALOKASI%20UMUM%20,%20_SAPTANINGSIH%20SUMARMI_.pdf. Diakses tanggal 30 November 2016)

Pardede dan dan Rehard Manurung. (2014). *Analisis Jalur (Path Analysis)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Suprayitno, Bambang. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP. Vol.2, No.1, Juni 2015, hal 106-112.ISSN 2339-1545. (<http://jrap.univpancasila.ac.id/index.php/JRAP/article/download/37/24> . diakses 27 November 2016)

Titimamah dan Furqani, Astri. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemkab Suenep (Periode 2009-2013)*. *Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis dan Akuntans*. Vol. V, No.2, September 2015. (<https://ejournal.wiraja.ac.id/index.php/FEB/article/download/188/157>. diakses tanggal 26 November 2016)

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Wertianti, I G A Gede dan Dwirandra. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi ada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.3 (2013): 567-584. ISSN: 2302-856.
(<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/6379/4902>. diakses tanggal 27 November 2016)
- Widianto, Andri, dkk. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
(http://www.academia.edu/23894811/Pengaruh_Pendapatan_Asli_Daerah_Terhadap_Belanja_Modal_Pertumbuhan_Ekonomi_dan_Kemiskinan_Kab_Kota_Di_Daerah_Istimewa_Yogyakarta. diakses tanggal 30 November 2016)

**Data Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2012-2014**

(Dalam jutaan)

No	Kabupaten/Kota	PDRB (%)			PAD (Rp)			DAU (Rp)			Belanja Modal (Rp)		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	Kabupaten Lahat	5.28	4.83	3.83	70938	78313	125319	516937	566788	615240	240108	409290	369550
2	Kabupaten Musi Rawas	0.85	5.88	7.37	73018	75367	120153	537624	635201	420562	447716	564542	413464
3	Kabupaten Muara Enim	8.27	6.76	3.13	119456	125111	138706	580314	678488	593564	555453	819081	634279
4	Kabupaten Ogan Komering Ilir	6.56	6.36	5.07	54618	68701	145591	743453	844191	931159	381294	481992	444998
5	Kabupaten Ogan Komering Ulu	5.26	4.46	3.67	41429	44680	79344	456823	517310	568771	221203	341065	290864
6	Kabupaten Empat Lawang	6.11	5.39	4.23	21467	24230	32656	274671	308418	360872	177210	245491	365015
7	Kabupaten Banyuasin	6.15	6.18	5.14	67767	81364	106918	651358	772464	824219	337733	561773	653603
8	Kabupaten OKU Timur	7.20	6.96	5.19	34834	36918	62418	541449	680714	680714	165289	252320	238864
9	Kabupaten Ogan Ilir	8.03	7.26	6.55	31742	22080	49061	446519	520288	334233	320696	463615	334233
10	Kota Lubuk Linggau	6.35	3.37	6.33	38256	41693	50181	328282	377967	414758	162347	282058	295111
11	Kota Palembang	7.75	5.85	5.24	518859	558705	734219	934084	1125008	1203662	397764	678418	618887

Sumber : Data yang diolah, 2017

ANALISIS DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	33	.85	8.27	5.6624	1.57147
PAD	33	21467	734219	117397.33	162680.084
DAU	33	274671	1203662	605639.55	225422.075
Belanja Modal	33	162347	819081	398949.27	163997.807
Valid N (listwise)	33				

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	130256.5665
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.712
Asymp. Sig. (2-tailed)		.691

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

UJI MULTIKOLONEARITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PDRB	.996	1.004
	PAD	.409	2.447
	DAU	.409	2.447

a. Dependent Variable: Belanja Modal

UJI HETEROSKEDASITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7864.312	70213.065		-.112	.912
	PDRB	9849.932	8989.459	.195	1.096	.282
	PAD	-.140	.136	-.287	-1.033	.310
	DAU	.116	.098	.329	1.185	.246

a. Dependent Variable: res2

UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.608 ^a	.369	.304	136828.201	1.896

a. Predictors: (Constant), DAU, PDRB, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	161779.475	120453.049		1.343	.190
	PDRB	-5408.093	15421.742	-.052	-.351	.728
	PAD	.001	.233	.001	.006	.995
	DAU	.442	.168	.607	2.633	.013

a. Dependent Variable: Belanja Modal

UJI KORELASI DAN UJI DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.608 ^a	.369	.304	136828.201

a. Predictors: (Constant), DAU, PDRB, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

UJI SECARA SIMULTAN (UJI F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	317712245661.036	3	105904081887.01	5.657	.004 ^b
	Residual	542936739909.510	29	18721956548.604		
	Total	860648985570.545	32			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAU, PDRB, PAD

UJI SECARA PARSIAL (UJI t)

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.343	.190
	PDRB	-.351	.728
	PAD	.006	.995
	DAU	2.633	.013

a. Dependent Variable: Belanja Modal

BIODATA PENULIS

Nama : Putri Retno Aryani
NIM : 22 2013 179
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Enim, 09 juli 1995
Alamat : Jl. Cempaka No.30 RT/RW 002/001 Karang
Asam, Tanjung Enim
Telephone : 082372274656
Email : Putri.aryani21@yahoo.com
Nama Orang Tua :
Ayah : M. Suyatno
Ibu : Anggrainy
Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : Pensiunan BUMN
Ibu : Karyawan BUMN
Alamat orang tua : Jl. Cempaka No.30 RT/RW 002/001 Karang
Asam, Tanjung Enim



GALERI INVESTASI
BURSA EFEK INDONESIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Jln. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 – 513022 Fax. 0711 - 513078

Nomor : 65 /R-59/GI.BEI UMP/II/2017
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Riset**

Palembang, 12 Jumadil Awal 1438 H
09 Februari 2017 M

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi UMP
di-
Palembang

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Ba'da salam semoga Allah SWT selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, Amiin.

Kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang bahwa mahasiswa di bawah ini dengan:

Nama : Putri Retno Aryani
NIM : 22 2013 179
Jurusan : Akuntansi

Telah melakukan pengambilan data di Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id dan diketahui oleh pojok Bursa Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat
Wasalamu'alaikum, wr, wb.

Mengetahui,
Ketua Galeri Investasi BEI UMP


***Eryita Safitri, S.E., M.Si.**
NIDN : 0225126801
GALERI INVESTASI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : PUTRI RETNO ARYANI
NIM : 222013179
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ (21)** Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Rabu, 24 Agustus, 2016
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Dr. Purmanayah Ariadi, M.Hum
NIDN/IDN : 731454/0215126902



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Putri Retno Aryani
Place/Date of Birth : Tanjung Enim, July 09th 1995
Test Times Taken : +2
Test Date : January, 17th 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 45
Structure Grammar : 38
Reading Comprehension : 37
OVERALL SCORE : 400

Palembang, February, 01st 2017

Chairperson of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

No. 249/TEA FE/LB/UMP/II/2017

LEMBAGA BAHASA
Unit: Muhammadiyah Palembang

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

123 certificates



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Putri Retno Aryani	PEMBIMBING :
NIM : 222013179	KETUA : Drs. Sunardi, S.E., M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJAMODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	29-1-2017	Bab I, II, III			Pabulan
2.	2-2-2017	Bab I, II, III			Ago
3.	4-2-2017	Bab IV			Sept
4.	6-2-2017	Bab IV			Pabulan
5.	8-2-2017	Bab IV, V			Ok
6.	9-2-2017	Analisa del			Ok
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /



Betri Sirajuddin, S.E., AK., M.Si., CA

BERITA ACARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ketua Penguji : ROSALINA GHAZALI, S.E. AK, M.SI
2. Anggota Penguji 1 : BETRI, S.E., M.SI, AK
3. Anggota Penguji 2 : MIZAN, S.E., M.SI, AK

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ujian komprehensif / tugas akhir yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Februari 2017
Pukul : 08:00-12:00 WIB
Ruangan :

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang atas nama mahasiswa :

Nama : PUTRI RETNO ARYANI
Nomor Pokok : 222013179
Bidang Tugas Akhir : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS

I. PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIP

No.	Aspek yang dinilai	Nilai			Jumlah
		Ketua Penguji	Anggota Penguji 1	Anggota Penguji 2	
1	Penguasaan Skripsi	7	7	7	
2	Penguasaan materi	7	7	7	
3	Cara Mengemukakan Pendapat	7	7	7	
	Total Penilaian	21	21	21	63
	Tanda Tangan>Nama Terang	ROSALINA GHAZALI, S.E. AK, M.SI	BETRI, S.E., M.SI, AK	MIZAN, S.E., M.SI, AK	(B)

II. PENILAIAN SKRIPSI

No.	Aspek yang dinilai	Nilai			Jumlah
		Ketua Penguji	Anggota Penguji 1	Anggota Penguji 2	
1	Kesesuaian antara perumusan masalah, analisis & kesimpulan	7	7	7	
2	Metodologi/Analisis pemecahan masalah	7	7	7	
3	Teknik Penulisan	7	7	7	
	Total Penilaian	21	21	21	63
	Tanda Tangan>Nama Terang	ROSALINA GHAZALI, S.E. AK, M.SI	BETRI, S.E., M.SI, AK	MIZAN, S.E., M.SI, AK	(B)

Total Nilai Komprehensif

: 63 [A], (B), [C], [TL]

Total Nilai Skripsi

: 63 [A], (B), [C], [TL]

Catatan :

A= 72 - 90

B= 54 - 71

C= 36 - 53

< 35 TIDAK LULUS

Palembang, 28 Februari 2017

Ketua Penguji,

ROSALINA GHAZALI, S.E. AK, M.SI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/ I / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/ I / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/SI/XII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/ 2015 (B)

fe.umpalembang.ac.id

Email : febumpg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Maret 2017
Waktu : 08.00-12.00
Nama : Putri Retno Aryani
NIM : 22 2013 179
Jurusan : Akuntansi
Bidang Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul : **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING
SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Sunardi, S.E., M.Si	Pembimbing	17 / Maret 2017	
2	Rosalina Ghozali, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	15 / Maret 2017	
3	Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Penguji I	1 - 3 - 2017	
4	Mizan, S.E., M.Si., Ak	Penguji II	7 - 3 - 2017	

Palembang, Maret 2017

Mengetahui

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi




Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806